

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Militerisme dan kolonialisme merupakan kekuatan yang tidak dapat dipisahkan yang telah membentuk Hawai'i modern. Lebih dari seratus tahun sejak militer Amerika Serikat turut andil dalam penggulingan Kerajaan Hawaii pada tahun 1893, militerisme terus mendistorsi lingkungan budaya dan politik. Militerisme di Hawaii adalah produk takdir nyata. Terletak di persimpangan rute perdagangan dan militer Asia Pasifik, kepentingan geopolitik Hawaii menjadikannya pusat dari strategi militer Amerika Serikat. (Kyle, 2000)

Militerisasi juga emberikan dambak terhadap masyarakat Hwaii untuk kembali ke tahan mereka. Undang-Undang Komisi Rumah Hawaii 1920 menyisihkan 187.000 hektar untuk penduduk asli. . Gugus Tugas Federal-Negara 1983 menyimpulkan bahwa 13.580 hektar Tanah Rawa Hawaii ditarik secara tidak layak melalui perintah eksekutif presiden. (Kyle, 2000)

Sebagai akibat dari Perang Spanyol-Amerika, Amerika Serikat memilih untuk secara sepihak menganeksasi Kepulauan Hawaii dengan memberlakukan resolusi bersama kongres, dalam rangka memanfaatkan Kepulauan Hawaii sebagai pangkalan militer untuk melawan Spanyol di Guam dan orang Filipina. Amerika Serikat tetap berada di Kepulauan Hawaii dan Kerajaan Hawaii sejak saat itu berada di bawah pendudukan berkepanjangan hingga saat ini, tetapi kesinambungannya sebagai Negara merdeka tetap utuh di bawah hukum internasional.

Tidak hanya itu militerisasi tanah di Hawaii juga berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup budaya penduduk asli Hawaii, yang silsilah, kerohanian, dan mata pencahariannya bergantung pada memiliki hubungan langsung dan vital dengan tanah. (Kyle, 2000). Karena kehadiran militer yang luar biasa di Hawaii, perlawanan terhadap militerisme relatif individual dan spontan sampai tahun 1970-an, ketika sebuah gerakan terorganisir melawan pendudukan militer atas tanah-tanah tertentu pertama kali muncul di Hawai'i. Didorong oleh perjuangan pembebasan dunia ketiga dan hak-hak sipil Amerika Serikat, kekuatan etnis, dan gerakan anti-perang, dan aktivis progresif mulai mendorong agenda yang lebih radikal, anti militeris dan anti kolonialis. (Kyle, 2000)

Sebuah piagam PBB dibuat yang menyerukan pemerintahan sendiri teritori dalam kondisi gaya kolonial. Piagam tersebut menguraikan tiga pilihan untuk penentuan nasib sendiri: integrasi, asosiasi bebas, atau kemerdekaan. Menurut Gerakan Kedaulatan, AS hanya menyediakan satu opsi, integrasi, yang mengarah ke kenegaraan pada tahun 1959. Meskipun AS berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan piagam sebagai penandatanganan, itu tidak mengajukan dua opsi lain kepada orang-orang Hawaii. Dalam upaya pebebasan Hawaii Kaum nasionalis kerajaan cenderung menolak protokol PBB untuk dekolonisasi dan juga hak-hak penduduk asli sebagai solusi untuk kasus Hawaii. (Letts, 2002)

Ada arus vokal pendukung yang mendukung Kedaulatan Asli Hawaii sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Reorganisasi Pemerintah Asli Hawaii (dikenal sebagai RUU Akaka). Proposal ini dapat menciptakan pemerintahan asli Hawaii yang akan memberikan segalanya mulai dari hak istimewa khusus untuk orang-orang leluhur asli Hawaii hingga berpotensi memisahkan diri sepenuhnya dari

Negara Bagian Hawaii sebagai negara merdeka. Ada implikasi signifikan di dalam dan di luar negeri yang sangat membebani dukungan politik yang diharapkan untuk pengesahan RUU ini. (Jenkins, 2011)

Pergerakan masyarakat hawaii tidak lepas dari adanya kelompok pergerakan, di antara dari organisasi pergerakan yang ada di hawaii ialah Ha Hawaii'i , Ka Pakaukau, Nation of Hawaii'i yang dipimpin oleh Dennis Bumpy Pu'uhonua Kanahale dia memelopori berdirinya desa budaya dan restorasi pertanian tradisional. Namun OHA menjadi salah satu organisasi besar yang menjadi badan yang mengadvokasi berbagai permasalahan masyarakat Hawaii

Penggulingan Kerajaan Hawaii dilancarkan pada tahun 17 Januari 1893 setelah Ratu Liliuokalani dikudeta di pulau Oahu oleh warga asing yang menetap di Honolulu (mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat). Dalam upaya untuk meredakan ketegangan, Liliuokalani mengeluarkan proklamasi bahwa segala perubahan yang akan dia lakukan untuk konstitusi akan diselesaikan dalam kerangka kerja yang sekarang. Tetapi sudah terlambat untuk membalikkan gelombang pasang para pebisnis yang melihat kesempatan mereka untuk akhirnya menyingkirkan monarki. Pada 16 Januari, 162 pelaut dan marinir AS mendarat.

Keesokan harinya, Komite Keselamatan mengeluarkan proklamasi mereka yang menyatakan darurat militer, menggulingkan ratu, dan membentuk Pemerintahan Sementara sampai saat persatuan dengan AS dapat dicapai. Atas desakan Kabinetnya, ratu menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah AS dan meninggalkan Istana untuk rumah pribadinya di dekatnya. Pada tengah malam, hampir semua 17 konsul asing di Honolulu telah mengakui pemerintahan baru, termasuk Stevens dan Konsul Jenderal Jepang Saburo Fujii

Sebagai langkah menuju penentuan nasib sendiri, RUU Akaka, sebagaimana diperkenalkan dalam versi 2011-nya, menyediakan proses bagi penduduk asli Hawaii untuk mengatur kembali entitas pemerintahan asli Hawaii, mendirikan Kantor Hubungan Hawaii di dalam Departemen Dalam Negeri, dan membuat Kelompok Koordinasi Antar-Lembaga Asli Hawaii untuk mengelola program-program Asli Hawaii. (Zhang, 2017)

Sebagian besar masyarakat Hawaii melakukan tindakan protes dengan cara tidak merayakan kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli pada 2019 kemarin hal. Hal ini disebabkan sama halnya dengan mereka merayakan hilangnya kemerdekaan tanah leluhur mereka. Selain itu warga Hawaii melakukan protes terhadap pembangunan teleskop di gunung *Mauna Kea* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada 17 Agustus 2019. Berbagai tindakan protes yang dilakukan karena Hawaii merasa kebebasannya akan tanah leluhur mereka telah direnggut paksa.

Kantor Urusan Hawaii lahir dari upaya kolektif dan penuh kasih dari pihak delegasi ke Konvensi Konstitusi negara tahun 1978. Mereka berbicara dengan rasa keadilan, untuk memperbaiki kesalahan yang diderita oleh penduduk asli Kepulauan Hawaii untuk tepatnya 200 tahun. Kedatangan Kapten Cook di Hawai'i tidak hanya membawa peningkatan kontak dengan dunia di luar pantai pulau-pulau yang masih asli, tetapi juga penyakit yang menghancurkan populasi asli, dan cara hidup yang menekan keadaan mereka yang tersisa.

Ketentuan kenegaraan telah mempertimbangkan nasib rakyat Hawaii, khususnya dalam Admission Act tahun 1959. Bagian 5 dari undang-undang tersebut mengacu pada mahkota dan tanah pemerintah Kerajaan Hawaii, yang telah ditetapkan "diserahkan" kepada Republik Hawai'i dan kemudian ke Amerika Serikat. Undang-undang membawa tanah-tanah ini ke

Negara Bagian Hawaii yang baru dengan peringatan bahwa pendapatan merupakan kepercayaan untuk lima tujuan. Salah satunya adalah perbaikan kondisi penduduk asli Hawaii. Dengan ukuran apa pun, kondisi-kondisi itu sangat membutuhkan perbaikan, tetapi, pada 1978, mereka tidak berubah menjadi lebih baik karena kewajiban kepercayaan negara diabaikan.

Pada 1978, sebuah Konvensi Konstitusi dipanggil untuk meninjau dan merevisi fungsi dan tanggung jawab pemerintah Hawaii. Pada konvensi tersebut, Paket Legislatif Asli Hawaii dianggap oleh para delegasi. Di antara ketentuan yang dimasukkan ke dalam konstitusi negara yang baru adalah pembentukan Kantor Urusan Hawaii sebagai kepercayaan publik, dengan mandat untuk memperbaiki kondisi baik penduduk asli Hawaii dan komunitas Hawaii secara umum. *Office of Hawaiian Affairs* akan didanai dengan bagian pendapatan rata-rata dari tanah negara yang ditetapkan sebagaimana diserahkan.

Faktanya, sifat publik dari tanah-tanah ini mendahului penciptaan *Office of Hawaiian Affairs* selama bertahun-tahun. Tanah-tanah ceded, yang terdiri dari tanah-tanah mahkota, yang pernah menjadi milik kerajaan Hawaii, dan tanah-tanah pemerintah Kerajaan Hawaii, berjumlah 1,8 juta hektar setelah dianeksasi pada tahun 1898. Berdasarkan Resolusi Bersama Penyertaan, semua tanah ini dianggap dipindahkan atau diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat "untuk kepentingan penduduk Kepulauan Hawaii. Sebagai bagian dari mandatnya untuk melakukan advokasi bagi penduduk asli Hawaii, *Office of Hawaiian Affairs* setiap tahun mengajukan paket tagihan yang diusulkan kepada Badan Legislatif Negara Bagian Hawaii, dan Dewan Pengawas badan tersebut juga memberikan suara untuk mengambil posisi pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi komunitas Hawaii. (Affairs, The Establishment of OHA)

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya *Office of Hawaiian Affairs* untuk mendapatkan dukungan politik dalam upaya mendapatkan kemerdekaan Hawaii dari Amerika Serikat?

## **C. Kerangka teoritik**

### **1. Kedaulatan**

Menurut *Black's Law Dictionary (six edition)* kedaulatan merupakan kekuatan tertinggi, absolut, dan tak terkendali yang dengannya setiap negara merdeka diatur; otoritas politik tertinggi; kehendak tertinggi; kendali tertinggi terhadap konstitusi dan kerangka pemerintahan dan administrasinya; sumber kemandirian kekuatan politik, dari mana semua kekuatan politik spesifik diturunkan; kemerdekaan internasional suatu negara, dikombinasikan dengan hak dan kekuasaan untuk mengatur urusan internalnya tanpa dikte asing juga masyarakat politik, atau negara, yang berdaulat dan mandiri. (org H. n.)

Tujuan dari teori kedaulatan ialah untuk menjelaskan fenomena krisis kedaulatan yang terjadi di Hawaii. Teori ini menjelaskan mengenai nilai dasar dari hak sebuah negara. Dengan ini aspek keamanan Hawaii tentunya menjadi perhatian dikarenakan banyaknya penangkapan terhadap aktivis pergerakan Hawaii merdeka.

Dalam hal ini kedaulatan itu tidak statis tetapi sebaliknya merupakan fenomena yang berubah-ubah terjadi ketika konsep itu sendiri memiliki arti yang

berbeda untuk berbagai profesi, disiplin ilmu, dan budaya politik dan hukum. Selain itu, sifat politik dunia dan hubungan internasional telah sangat dipengaruhi oleh proses yang dikemas dalam istilah globalisasi (Haddad, 2001).

Aneksasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat menjadi salah satu faktor bengkaknya pergerakan kedaulatan Hawaii yang menuntut akan kemerdekaan tanah leluhur mereka yang tidak pernah mereka serahkan kepada Amerika Serikat hal ini juga di dukung oleh pembangunan teleskop di kawasan gunung Mauna Kea yang merupakan kawasan sakral bagi masyarakat Hawaii. Disini digunakan teori kedaulatan sebagai cara untuk menggambarkan bahwa Hawaii merupakan kerajaan yang berdaulat dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya pada Amerika Serikat.

Tindakan Hawaii dalam menginginkan pemberian pengakuan terhadap kedaulatan kerajaan Hawaii daripada Amerika Serikat menjadi diakibatkan dengan adanya aneksasi di kepulauan ini. kedaulatan sebagai kekuatan tertinggi, abadi, dan tak terpisahkan, ditandai oleh kemampuan untuk membuat hukum tanpa persetujuan dari yang lain. Kepemilikannya oleh penguasa tunggal, kelompok, atau seluruh tubuh warga negara mendefinisikan persemakmuran sebagai monarki, aristokrasi, atau negara populer. (World, 2004).

## 2. Separatisme

Menurut Dewi Fortuna Anwar, bahwa separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara istilah separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu

kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Orang-orang yang terlibat di dalamnya disebut kaum separatist. Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam berbagai literatur hukum internasional pada hakekatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain, atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas. (Sefriani, 2003)

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dapat dengan mudah melakukan aneksasi dan berbagai pembangunan tanpa memperhatikan aspek yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat asli Hawaii, seperti halnya pengulingan ratu yang sah saat itu yakni ratu Lili'uokalani yang menjadi ratu kerajaan Hawaii saat itu.

Dalam hal ini Hawaii yang merasa dirinya sebagai Kerajaan yang berdaulat dan tidak pernah sekalipun menyerahkan kedaulatannya kepada amerika serikat secara plebisit maupun referendum. Dengan melihat dari salah satu entitas yang ditawarkan oleh *Office of Hawaiian Affairs* bahwa separatisme merupakan jalan yang harus ditempuh dalam mengembalikan kedaulatan tanah leluhur mereka yakni entitas model Kemerdekaan dimana melakukan penarikan total dsri sistem pemerintahan Amerika Serikat.

#### **D. Hipotesis**

Ketidakpuasan akan kebijakan dan aneksasi menjadi dasar kelompok pergerakan kedaulatan hawaii seperti *Office*



*of Hawaiian Affairs* ingin melakukan pemerdekaan diri terhadap Amerika Serikat dengan memberikan berbagai entitas sebagai alternatif advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi Hawaii dengan memperhatikan tujuan dan fokus *Office of Hawaiian Affairs* yaitu :

1. -Fokus dan Tujuan *Aina*  
Fokus *Aina* untuk melindungi bagian dari upaya yang lebih besar untuk menghormati masa lalu sambil mempersiapkan masa depan berbasis kepemilikan tanah serta mengadvokasi kepemilikan tanah dan kepemilikan atas air terhadap masyarakat Hawaii.
2. -Fokus dan Tujuan Budaya  
*Office of Hawaiian Affairs* melihat budaya sebagai cara bagi orang Hawaii untuk mengidentifikasi satu sama lain, memberikan rasa kesatuan dan kepemilikan secara otomatis serta memungkinkan mereka untuk lebih memahami generasi sebelumnya dan sejarah dari mana mereka berasal.
3. -Fokus dan Tujuan ekonomi  
Menyiapkan masyarakat Hawaii yang siap bersaing dan matang dalam perekonomian
4. -Fokus dan Tujuan Pendidikan  
Untuk memaksimalkan pilihan hidup dan pekerjaan, penduduk asli Hawaii perlu mendapatkan pengetahuan dan unggul dalam peluang pendidikan di semua tingkatan.
5. -Tujuan dan Tujuan Pemerintahan  
Penduduk asli Hawaii untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memutuskan bentuk apa yang akan diambil oleh negara bagian Hawaii dan hubungan

seperti apa yang akan diupayakan dengan pemerintah lain.

6. -Fokus dan Tujuan Kesehaan

Ketika berbicara tentang kesehatan, mempertimbangkan kesehatan dan Kesejahteraan dengan menyeimbangkan konsep tradisional OHA tentang kesehatan fisik, emosi, mental, dan spiritual masyarakat Hawaii

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana Metode deskriptif kualitatif adalah bagian dari penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan fenomena dan kearakteristiknya dan untuk mengumpulkan informasi terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan terjadi ketika penelitian dilakukan. Metode penelitian ini berfokus pada bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif menggunakan observasi dan survey dengan melibatkan eksplorasi induktif dalam analisis data untuk mengidentifikasi tema, pola, atau konsep yang berulang dan kemudian menggambarkan dan menafsirkan kategori tersebut (Sugiono, 2008)

Dalam penelitian ini di jelaskan secara deskriptif dan sistematis dengan melihat dan menganalisis data secara kualitatif untuk menjelaskan bagaimana proses perkembangan perjuangan pengakuan kedaulatan dari Amerika Serikat kepada kerajaan Hawaii, dengan berbagai kebijakan dan aksi dan menggunakan metode akumulasi sekunder untuk mendukung akredibilitas penelitian.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam memudahkan penelitian, penulis membatasi waktu penelitian ini yaitu dengan menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Alasan mengapa pada periode 2000-2019, karena pada kisaran tahun tersebut pergerakan *Office of Hawaiian Affairs* mulai terarah dan menjadi pergerakan yang lebih modern. Dipilihnya hingga tahun 2019 agar dapat mengetahui perkembangan dari gerakan dan advokasi terbaru yang dilakukan oleh organisasi ini.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut;

**BAB I** : Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini membahas penjelasan singkat mengenai sejarah pembentukan Hawaii dan implementasi teori

**BAB III** : Pada bab ini berisi tentang penjelasan masalah-masalah yang ada dan reaksi publik terhadap pergerakan kedaulatan Hawaii

**BAB IV** : Pada bab ini penulis akan menganalisa menarik kesimpulan dan saran apa yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini

